**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Literatur Reviu**

Literatur reviumerupakan kerangka yang disusun oleh penulis untuk mengklasifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. Tujuan dari literatur revieuitu sendiri adalah untuk mendapatkan pemahaman terkait permasalahan yang dikaji yakni terkait *Foreign Direct Investment* yang kemudian akan diolah untuk memecahkan masalah yang diteliti yang disesuaikan dengan kerangka berpikir ilmiah. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menghimpun informasi dari tulisan terdahulu yang relavan dengan topik yang diantaranya bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, *press release*, skripsi, dan berita-berita resmi.

Adapun beberapa **literatur reviupokok** penulis diantaranya sebagai berikut:

1. **Peranan *Foreign Direct Investment* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia[[1]](#footnote-1)**

Literatur reviu ini merupakan Jurnal Ilmiah disusun oleh Syafaat Fachriza Agma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Disini memaparkan selama 30 tahun terakhir dan setelah krisis 1998 menunjukan bahwa *foreign direct investment* berpengaruh positif siginfikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pada saat sebelum terjadinya krisis

1998 *foreign direct investment* berpengaruh negatif akan tetapi tidak siginfikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengaruh adanya *foreign direct investment* yang masuk di Indonesia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya, peningkatan infrastruktur dalam pembuatan jalan untuk membantu pendistribusian hasil produksi, serta meningkatan ekspor. Sedangkan pengaruh negatif disebabkan oleh adanya paket oktober 1988 yang berisi tentang kemudahan pembukaan bank bank baru.

1. **Implementasi *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)[[2]](#footnote-2)**

Literatur reviu ini berupa Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Anugrah Adiastuti dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang diterbitkan dalam Jurnal Pandecta Volume 6, Nomor 2, Juli 2011. Penulis dalam jurnal ini memaparkan bahwa stabilitas pertumbuhan perekonomian di suatu negara sangat ditentukan oleh besa­ran investasi yang masuk dan berjalan secara optimal. Adapun pertumbuhan perekonomi­an di Indonesia masih berjalan lambat dika­renakan masih adanya hambatan-hambatan investasi yang cukup berarti diantaranya bu­ruknya infrastruktur (baik dari segi kuantitas maupun kualitas), tumpang tindihnya pera­turan perundangan di bidang investasi, tidak adanya koordinas kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan masih ter­kendalanya pembebasan tanah yang akan dipergunakan untuk investasi.

Meski masih terdapat hambatan-hambatan di dalam op­timalisasi investasi dan akselerasi pertumbu­han ekonomi di Indonesia, pemerintah Indo­nesia juga telah melakukan perbaikan iklim investasi melalui dinudangkannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang masih harus terus dilakukan pengkajian guna mengoptimal­kan implementasi undang-undang tersebut, diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang investasi, serta terdapatnya pengaturan dan pengkajian mengenai daftar bidang usaha terbuka dan tertutup untuk in­vestasi (dalam hal ini berkaitan dengan DNI-Daftar Negatif Investasi). Adapun pendapat dari penulis dari jurnal ini bahwa guna meminimalisir hambatan investasi di indonesia pemerintah harus segera melakukan pembenahan terkait hambatan yang dihadapi untuk menarik minat investor dalam berinvestasi di Indonesia.

1. **Determinan FDI (Faktor-faktor yang menentukan Investasi Asing Langsung)[[3]](#footnote-3)**

Literatur reviu berikut merupakan *Working Paper* yang disusun oleh Yati Kurniati, Andry Prasmuko, dan Yanfitri diterbitkan dalam WP/06/2007 oleh Bank Indonesia. Disini dijelaskan mengenai arus FDI ke negara-negara *emerging* Asia telah meningkat pesat sejak awal tahun 1990an. Meskipun sempat menurun ketika terjadi krisis Asia, aliran masuk FDI ke negaranegara tersebut telah kembali meningkat pesat paska krisis. Namun demikian, kenaikan aliran modal masuk di dalam bentuk FDI ke Indonesia masih relatif terbatas. Sebagai bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap gejolak perekonomian, aliran masuk FDI sangat diharapkan untuk membantu mendorong pertumbuhan investasi yang *sustainable* di Indonesia. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui determinan FDI di Indonesia agar kebijakan untuk mendorong peningkatan aliran FDI dapat lebih efektif diarahkan pada faktor-faktor yang berperan penting dalam mendorong minat investor asing untuk menanamkan modal dalam bentuk FDI di Indonesia.

Secara konseptual, pilihan investor asing untuk menanamkan investasinya dalam bentuk FDI, dibanding bentuk modal lainnya di suatu negara, dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima FDI (*pull factors*) maupun kondisi dan strategi dari penanam modal asing (*push factors*). *Pull factors* dari masuknya FDI antara lain terdiri dari kondisi pasar, ketersediaan sumber daya, daya saing, kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan liberalisasi FDI (di dalam bentuk insentif investasi). Sedangkan yang termasuk *pull factors* antara lain strategi investasi maupun strategi produksi dari penanam modal, serta persepsi resiko terhadap negara penerima.

1. **Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi *Foreign Direct Investment* di 5 negara ASEAN[[4]](#footnote-4)**

Literatur reviu berikut adalah jurnal ilmiah yang disusun oleh Andi Adiyudawansyah & Dwi Budi Sasonto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dalam tulisan ini menjelaskan peran Investasi Asing Langsung (FDI) dalam menopang pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang khususnya 5 negara di ASEAN yang menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini yakni negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Yang mana Peningkatan FDI dianggap penting dalam menjamin kelangsungan pembangunaan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology, know-how, management skill,* resiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable*. Sebagai bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap gejolak perekonomian, FDI diharapkan untuk membantu mendorong pertumbuhan investasi yang *sustainable* di Indonesia.

Rendahnya persentase FDI terhadap PDB di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di satu kawasan ASEAN membuat diperlukan adanya upaya-upaya peningkatan FDI ke Indonesia. Selain itu juga dijelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi arus *Foreign Direct Investment* ke negara-negara tersebut, klasifikasi dari investasi asing dan juga pendapat penulis bahwa pentingnya upaya pemerintah untuk merangsang aktivitas ekonomi agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat.

1. **Dampak *Economic Freedom* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia[[5]](#footnote-5)**

Literatur reviu ini berupa Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Agustina Suparyati dan Nurul Fadilah dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 16, Nomor 2, Oktober 2015, hlm.158-176. Dalam tulisan tersebut menjelaskan pengaruh variabel FDI, nilai tukar serta *economic freedom* dan komponen penyusunnya dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok negara berkembang yang terdiri dari 7 negara antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja dan Filipina, sedangkan untuk kelompok negara maju yang terdiri dari 4 negara yaitu Jepang, Korea Selatan, Cina dan Singapura. Variabel FDI dan nilai tukar sebagai variabel klasik terbukti secara nyata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun berkembang.

1. **Pengaruh Reformasi Ekonomi India Mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI) Terhadap Strategi Investasi *Softbank Group Corporation* di India 2013-2016[[6]](#footnote-6)**

Literatur reviu berikut merupakan Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Titi Sumbari dari Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau yang diterbitkan dalam JOM FISIP Vol. 4 No. 1, Februari 2017. Dalam jurnal tersebut membahas India sebagai salah satu negara yang mengalami transformasi ekonomi masif di dunia. Saat ini India termasuk ke dalam daftar 12 besar perekonomian dunia dan empat ekonomi besar Asia. Hal itu terjadi karena India telah melakukan reformasi ekonomi sejak tahun 1991 hingga sekarang, salah satunya dibidang investasi asing langsung atau *foreign direct investment* (FDI). Sehinngga India juga dikenal sebagai negara tujuan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) paling menarik keempat di dunia setelah Amerika Serikat, China, dan Inggris.

Dilihat dari beberapa revieu literatur diatas, yang secara garis besar menjelaskan bahwa liberalisasi ekonomi dengan strategi *Foreign Direct Investment* dapat dikatakan membawa perubahan terhadap perekonomian negara-negara maju maupun berkembang. Dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai *Foreign Direct Investment* ini, terdapat perbedaan dimana penulis lebih fokus terhadap Kebijakan yang mengatur penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia setelah adanya pembaharuan kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi asing langsung ke Indonesia dan juga pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.

* 1. **Kerangka Teoritis**

Didalam melakukan sebuah penelitian diperlukan teori atau kerangka konseptual sebagai kerangka pemikiran agar penelitian yang sedang di teliti sesuai pada jalur dan koridornya masing-masing, serta dapat membantu seorang penulis dalam menjelaskan serta menjabarkan berbagai permasalahan dan pembahasan dalam penelitian yang sedang dijalankan. Untuk itu, adapun teori serta konsep yang penulis gunakan didalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah:

1. **Hubungan Internasional**

Hubungan Internasional (HI) menggunakan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, sejarah, hukum, filsafat, politik, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, studi-studi budaya dalam kajian-kajiannya. Hubungan internasional menjadi penting saat ini karena negara tak dapat hidup sendiri dan memisahkan diri dari dunia internasional, dalam hal ini K.J.Holsti memberi deskripsi tentang pengertian hubungan internasional seperti di bawah ini:

“**Hubungan Internasional adalah segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Dan meliputi lembaga perdagangan internasional, perdagangan internasional, dan perkembangan etika internasional” [[7]](#footnote-7)**

Selain itu, sebagai tambahannya, dalam konteks Hubungan Internasional kontemporer, **T. May Rudy** dalam bukunya Hubungan Internsional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma, bahwa:

**“Hubungan Internasional pada masa lampau berfokus kepada kajian mengenai perang dan damai...masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut sebagai “high politic”. Sedangkan hubungan internasional kontemporer selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (nonstate actors)”.[[8]](#footnote-8)**

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa :

**“Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar”[[9]](#footnote-9)**

1. **Ekonomi Politik Internasional**

Dalam buku International Political Economy yang ditulis oleh Jeffry A Frieden dan David A. Lake dijelaskan bahwa Ekonomi politik internasional merupakan studi tentang adanya hubungan saling mempengaruhi antara ekonomi dan politik dalam arena Internasional. Dalam pengertian yang paling umum, ekonomi dapat didefinisikan sebagai sistem produksi, pendistribusian, dan penggunaan kekayaan, sedangkan politik adalah seperangkat institusi dan aturan yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi. Ekonomi politik memiliki berbagai makna. Bagi sebagian orang, yang terutama mengacu pada studi tentang dasar politik dari tindakan ekonomi, cara-cara di mana kebijakan pemerintah memengaruhi operasi pasar. Pendapat lainnya, yang utama adalah dasar ekonomi dari tindakan politik, cara-cara di mana kekuatan ekonomi membentuk kebijakan pemerintah. Kedua fokusnya dalam artian saling melengkapi, untuk politik dan pasar berada dalam interaksi saling menguntungkan.[[10]](#footnote-10)

Sedangkan menurut Mochtar Mas’oed adalah :

**“Ekonomi politik berfokus kepada studi tentang saling kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat” (Mas’oed, 2008).**

1. **Penanaman Modal Asing (*FDI*)**

Penanaman Modal yang khususnya dalam pembahasan ini Penanaman Modal Asing merupakan salah satu faktor yang dinilai mampu menjadi mesin penggerak perekonomian suatu negara. Penanaman Modal Asing didorong untuk kegiatan ekspor dan kegiatan pembangunan yang belum dapat dilakukan oleh modal dan kemampuan teknologi dalam negeri. Kesadaran akan pentingnya PMA diharapkan makin dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran masyarakat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk investasi, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung atau yang lebih dikenal dengan penanaman modal asing langsung (FDI) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakusisi perusahaan (Pandji Anoraga, 1995 : 46).[[11]](#footnote-11) Penanaman modal langsung yang mana menjadi jenis investasi yang dinantikan oleh *host country* dikarenakan dengan adanya *Foreign direct investment* ini dapat memberikan lebih banyak keuntungan bagi *host country* seperti bersifat permanen atau jangka panjang, memberi andil dalam alih teknologi, menberi andil dalam alih keterampilan, serta membuka lapangan kerja.[[12]](#footnote-12)

M. Sornarajah juga memberikan defenisi tentang foreign investment (investasi asing), yaitu sebagai berikut :

**“Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets”.[[13]](#footnote-13)**

Artinya penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total ataupun sebagian.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah :

**“Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”**

Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal indonesia, dimana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia, minimal modalnya sebesar 5%.[[14]](#footnote-14)

Dalam hal ini investasi asing merupakan salah satu bagian dari *Economic freedom* dimana suatu negara dengan sistem ekonomi terbuka melibatkan pihak eksternal yang dalam hal ini investor asing untuk dapat bekerjasama mencapai kepentingan kedua belah pihak. Indonesia sebagai negara berkembang yang masih sangat perlu meningkatkan perekonomian negaranya tentu membutuhkan modal yang memadai sebagai pendorong perekonomian dengan cara menarik investasi asing langsung (FDI) yang dapat membantu memenuhi *national interest* dalam pembangunan infrastruktur negara *host country* maupun pendirian perusahan yang dapat meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat setempat.

1. **Implementasi**

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

**“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.**

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.[[15]](#footnote-15)

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Banyak variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan.[[16]](#footnote-16)

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut :

**“Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.**

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan administrasif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.[[17]](#footnote-17)

Ada beberapa variable penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan variable-variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

***“four critical factors or variables in implementing public police: communication, resources, dispotitions or attitude, and bureaucratic structure”.***

Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu:[[18]](#footnote-18)

Pertama, komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan *(policy maker)* kepada pelaksana kebijakan *(policy implementors)*. Kedua yaitu sumberdaya, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi Sumber daya meliputi manusia *(staff)*, peralatan *(facilities)*, dan Informasi dan Kewenangan *(information and authority).*

Ketiga yaitu disposisi yang merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi *(staffing the bureaucracy)* dan insentif *(incentives)*. Keempat yaitu struktur birokrasi; struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

1. **Kebijakan**

Dalam rangka mendukung kelancaran *Foreign direct investment* ke Indonesia, menciptakan iklim investasi yang stabil menjadi perhatian khusus pemerintah. Keadaan internal suatu negara merupakan faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang menarik. Keanaman, stabilitas ekonomi serta politik dalam negeri menjadi pertimbangan para investor khususnya investor asing dalam berinvestasi di suatu negara. Untuk itu pentingnya peran pemerintah dalam membuat aturan-aturan ataupun kebijakan terkait penamanan modal baik modal domestik maupun asing untuk menjamin legalitas hukum.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak ataupun pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.[[19]](#footnote-19)

Mengutip pernyataan James E Anderson yang mengungkapkan bahwa kebijakan adalah :

***“a purposive* *course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a* *problem or matter of concern”* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).[[20]](#footnote-20)**

Ekonomi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti indonesia, untuk itu diperlukannya strategi untuk mengatasi persoalan ekonomi di indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah selaku pengambil keputusan tertinggi dalam suatu negara dapat menyusun strategi ataupun kebijakan ekonomi yang lebih terarah sebagai acuan dalam merealisasikannya. Salah satu strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yakni dengan membuka peluang investasi domestik maupun investasi asing. Kebijakan mengenai masuknya investasi asing langsung ke Indonesia secara yuridis dimulai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kebijakan tersebut mengalami deregulasi dikarenakan berbagai faktor eksternal maupun internal, kebijakan tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan tantangan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi. Kemudian pada tahun 2006 Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, dan pada tanggal 29 Maret 2007, RUU itu telah disahkan oleh DPR RI. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mencakup penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

1. **Kepentingan Nasional**

Setiap negara di dunia yang menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain tentunya memiliki berbagai tujuan yang dapat menunjang dalam memenuhi kepentingan negaranya, dikarenakan terbatasnya kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk itu terjalinnya kerjasama antar negara tidak terkecuali Indonesia dimaksudkan untuk dapat memenuhi *national interest* masing-masing negara.

Menurut Miroslav Nincic dikutip dari Jemadu, terdapat tiga asumsi dasar dalam mendefinisikan kepentingan nasional. *Pertama*, kepentingan itu harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. *Kedua*, kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional atau pencapaian kepentingan nasional dipengaruhi oleh lingkunga internasional. *Ketiga*, kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok atau lembaga pemerintahan sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.[[21]](#footnote-21)

**Hans J. Morgenthau**, seorang pakar dalam Ilmu Hubungan Internasonal menjelaskan bahwa :

**“Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.”[[22]](#footnote-22)**

Menurut Olthon kepentingan nasional adalah kesejahteraan ekonomi, militer keamanan dan pertahanan sebagai hasil dari bentuk adanya kepentingan nasional. Sehingga kepentingan nasional dapat menjadi arahan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan konsep dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri seperti yang terdapat dalam kamus hubungan internasional.[[23]](#footnote-23)

Ekonomi suatu negara merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas utama dalam keberlangsungan suatu negara, dimana pentingnya peran pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang tepat sehingga mampu mencapai tujuan berdirinya suatu negara yakni menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk sebagian negara berkembang seperti indonesia, dalam menciptakan perekonomian yang stabil tidak dapat dipungkiri masih membutuhkan faktor-faktor eksternal untuk mendorong pembangunan dalam negeri yakni dengan menjalin hubungan kerjasama dengan aktor-aktor hubungan internasional seperti *state* ataupun *non state* untuk memenuhi kepentingan nasional indonesia. Begitu pula yang dikatakan oleh Joseph Frankel bahwa kepentingan nasional merupakan aspirasi dari suatu negara yang bisa direalisasikan secara operasional pada suatu kebijakan dalam upaya mencapai suatu tujuan yang spesifik khususnya dalam hal ini mengenai investasi asing langsung.[[24]](#footnote-24)

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru, sampai dengan masa reformasi saat ini indonesia telah melewati berbagai pengalaman politik dan ekonomi. Pada masa orde lama kegiatan pemerintahan lebih terfokus pada urusan politik, dan pada masa orde baru kegiatan pemerintahan cenderung lebih terfokus pada kegiatan ekonomi. Pada era reformasi sekarang kegiatan pemerintahan cenderung kembali terarah pada kegiatan politik, namun ekonomi pun menjadi perhatian khusus terlebih karena dampak krisis ekonomi yang masih menjadi tugas penting yang perlu diatasi dalam upaya menstabilkan perekonomian Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi indonesia, secara umum adalah :[[25]](#footnote-25)

1. Faktor Produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada, dan pembangunan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.
2. Faktor Investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.
3. Faktor Perdagangan Luar Negeri dan Neraca Pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
4. Faktor Kebijakan Moneter dan Inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus antisipatif dan dapat diterima pasar.
5. Faktor Keuangan Negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah(tidak defisit).

Teori *neo*-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an dan berkembang berdasarkan analisis-analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ahli ekonomi yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori pertumbuhan tersebut adalah Robert Solow, yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Edmund Phelps, Harry Johnson dan J.E. Meade. Teori pertumbuhan ekonomi yang lebih dikenal dengan Teori (Solow-Swam) ini dikemukakan oleh ekonom Robert Solow *(Massachucets Institute of Technology)* dan Trevor Swam *(The Australian National University)* yang menjelaskan bahwa :

**“Pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan teknologi menyatakan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi output total”**

Teori Neo-klasik dipandang sebagai teori yang lebih tepat dalam menerangkan fenomena pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penyebab utamanya karena teori ini melihat bagaimana setiap faktor produksi dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teori ini juga menganalisis sumbangan dari perkembangan stok modal dan perkembangan teknologi dalam pembangunan ekonomi.[[26]](#footnote-26)

1. **Pembangunan Ekonomi**

Dalam proses memajukan suatu negara dan menciptakan kemakmuran, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan indikator yang berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh sebab itu, Pembangunan ekonomi menurut Sudono Sukirno adalah:

**“Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada satu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lainnya yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti pengembangan pendidikan, pengembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam insfrastruktur yang tersedia.”**

Seperti yang dikatakan Sudono Sukirno diatas bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, akan tetapi juga melihat diantaranya dari pengembangan teknologi dan juga dalam peningkatan dalam insfrastruktur yang tersedia.

Melihat dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia, bahwa investasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Dimana apabila adanya investasi terutama investasi asing seperti perusahaan dapat memberdayakan tenaga kerja dalam meningkatkan proses produksi output yang dapat diekspor ke luar negeri sehingga menambah pemasukan devisa negara. Selain itu, adanya kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat setempat.

1. **Industri Manufaktur**

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi Industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya.[[27]](#footnote-27)

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejateraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri. Dari sudut pandang geografi, Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia.[[28]](#footnote-28)

Industri manufaktur *(the manufacturing industries)*, adalah industri yang memproses bahan baku guna dijadikan bermacam-macam bentuk/model produk, baik yang berupa produk setengah jadi *(semi manufactured)* ataupun yang sudah berupa produk jadi *(finished goods product).* Disini akan terwujud suatu transformasi proses baik secara fisik ataupun kimiawi terhadap input material dan akan memberi nilai tambah yang lebih tinggi terhadap material tersebut. Contoh: industri permesinan, industri mobil, industri tekstil, dan lain-lainnya.[[29]](#footnote-29)

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, menimbulkan hipotesis penelitian bahwa :

*“Dengan di implementasikannya kebijakan penanaman modal asing Indonesia, perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) mengalami peningkatan khususnya FDI Jepang ke Indonesia dalam pembangunan industri manufaktur”.*

* 1. **Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas :**Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Asing (FDI) Indonesia  | 1. Implementasi kebijakan mengenai penanaman modal.
2. Program pemerintah Indonesia meningkatkan daya tarik Investasi Asing (FDI).
 | Pada tahun 2006 Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, dan pada tanggal 29 Maret 2007, RUU itu telah disahkan oleh DPR RI. Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini telah ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mencakup kebijakan penanaman modal asing dan domestik. Dapat dilihat melalui website :<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/25TAHUN2007UU.HTM>a). Upaya pemerintah membenahi kebijakan terkait kemudahan berinvestasi, dimaksudkan untuk menarik minat para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan insentif di bidang penanaman modal dapat dilihat melalui website : <http://www.bkpm.go.id/id/artikel/readmore/meningkatkan-investasi-melalui-kebijakan-insentif-di-bidang-penanaman-modal> dan *National Single Window for Investment* (NSWi) :<https://nswi.bkpm.go.id/> b). Dengan legalitas hukum yang pasti terkait penanaman modal asing serta kemudahan pelayanan usaha *(Ease of Doing Business)* untuk para investor, iklim investasi di Indonesia semakin mengalami peningkatan menurut survey dari UNCTAD. Dapat dilihat melalui website :<http://www.doingbusiness.org/rankings> |
| **Variabel Terikat :** Perkembangan Investasi Asing Langsung (FDI) Jepang ke Indonesia | 1. Negara-negara dari kawasan Asia mendominasi investasi asing yang masuk ke Indonesia.
2. Perkembangan Investasi Asing Jepang di Indonesia.
3. Kerjasama yang disepakati dalam kerangka IJEPA salah satunya untuk meningkatkan daya saing Industri sebagai *Manufacturing Industrial Development Center (*MIDEC)
4. Investasi Jepang di Indonesia mayoritas dalam sektor Industri
 | 1. Data sebagai gambaran terkait perkembangan realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya yang mana negara-negara di kawasan Asia seperti Jepang, Singapura dan Tiongkok mendominasi dengan jumlah investasi yang tinggi dan cukup stabil. Kemudian diikuti oleh negara dikawan Eropa dan Amerika sebagai negara investor terbesar di Indonesia. Dapat dilihat melalui website :

<https://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1319> 1. Jepang merupakan salah satu negara investor terbesar dengan menduduki peringkat kedua ditinjau dari tahun 2007 sampai 2017 dengan nilai investasi mencapai US$ 27,8 juta. Pasca di implementasikannya kebijakan PMA No.25 Tahun 2007, investasi di indonesia meningkat mencapai 43,8%. Nilai investasi Jepang di Indonesia secara kumulatif kurang lebih 10,2% dari total investasi asing di Indonesia. Data perkembangan Investasi Asing Jepang ke Indonesia dapat dilihat pada :

<https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik> 1. Kesepakatan kerjasama *Indonesian - Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang berlaku efektif sejak Juli 2008, salah satu bentuk kerjasama yang disepakati dalam IJEPA adalah meningkatkan daya saing industri yang selama ini disebut sebagai *Manufacturing Industrial Development Center (*MIDEC) dan bersifat jangka panjang. Dapat diakses pada :

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/6538/RI-Jepang-Tingkatakan-Daya-Saing-Industri-Melalui-Kerjasama-MIDEC> dan dapat diakses pada: <http://apki.net/wp-content/uploads/2015/07/New-MIDEC.pdf>1. Berdasarkan data Kementrian Perindustrian, 87% Investasi Jepang di Indonesia dalam sektor Industri Manufaktur. Dapat diakses pada : <http://www.kemenperin.go.id/artikel/14146/87-Investasi-Jepang-ke-Industri-Manufaktur>
 |

* 1. **Skema Penelitian**

**INDONESIA**

**Investor Asing**

**Kebijakan Penanaman Modal**

**JEPANG**

**Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007**



**Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

**Penanaman Modal Asing (PMA)**

**Foreign Direct Investment**

**Pembangunan Industri**

**Mendorong Pembangunan Industri di Indonesia**

1. Syafaat Fachriza Agma, “Peranan *Foreign Direct Investment* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015. [↑](#footnote-ref-1)
2. Anugrah Adiastuti, ‘Implementasi *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia (Sebelum dan Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)’ Pandecta, Volume 6. Nomor 2. Juli 2011, p.145. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yati Kurniati, Andry Prasmuko, dan Yanfitri, “ *Working Paper* Determinan FDI (Faktor-faktor yang menentukan Investasi Asing Langsung)”, Bank Indonesia, WP/06/2007. [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Adiyudawansyah & Dwi Budi Sasonto, “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi *Foreign Direct Investment* di 5 Negara ASEAN”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. [↑](#footnote-ref-4)
5. Agustina Suparyati dan Nurul Fadilah, “ Dampak *Economic Freedom* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 158-176. [↑](#footnote-ref-5)
6. Titi Sumbari, “Pengaruh Reformasi Ekonomi India Mengenai *Foreign Direct Investment* (FDI) Terhadap Strategi Investasi *Softbank Group Corporation* di India 2013-2016”, JOM FISIP Vol. 4 No. 1, Februari 2017. [↑](#footnote-ref-6)
7. K.J. Holisti, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* (Bandung: Binacipta, 1992), hal.27. [↑](#footnote-ref-7)
8. T. May Rudy, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Paradigma. (Bandung: P.T Refika Aditama,2003)., hlm. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. 2005. Hal. 3-4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jeffry A. Frieden and David A. Lake, International Political Economy : *Perspectives on Global Power and Wealth,* Taylor & Francis e-Library, 2003, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Salim HS & Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, 2008, hlm. 38. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*. hlm.39. [↑](#footnote-ref-12)
13. M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, Cambidge University Press, New York, 2010, hlm.8. [↑](#footnote-ref-13)
14. Salim HS & Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, 2008, hal.148. [↑](#footnote-ref-14)
15. Derri Septi, “Pengertian Implementasi”, dalam jurnal <<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/487/jbptunikompp-gdl-derrisepti-24335-2-babii_d-x.pdf>>, diakses pada 4 Mei 2018. [↑](#footnote-ref-15)
16. Victor Jacoblucas, “Teori Implementasi Kebijakan”, dalam jurnal <<http://www.academia.edu/24061760/TEORI_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN>>, hlm. 33. Diakses pada 4 Mei 2018. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. Victor Jacoblucas, “Teori Implementasi Kebijakan”, dalam jurnal <<http://www.academia.edu/24061760/TEORI_IMPLEMENTASI_KEBIJAKAN>>, hlm.34-36. Diakses pada 4 Mei 2018. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online dalam <<http://kbbi.kata.web.id/kebijakan/>>, diakses pada 20 November 2017. [↑](#footnote-ref-19)
20. Budi Winarno, “Apakah Kebijakan Publik? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Media Pressindo, 2002, hal.16. [↑](#footnote-ref-20)
21. Aleksius Jemadu. Politik Global Dalam Teori Dan Praktek. Yogyakarta. 2008, hal. 67. [↑](#footnote-ref-21)
22. Arinda M. Pangestu,” Definisi Teori-Teori dalam HI”, Academia.edu (*Online*), dalam <<https://www.academia.edu/9555977/Definisi_Teori-Teori_dalam_Hubungan_Internasional>>, diakses pada 19 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-22)
23. Jack C. Plano & Olton R. Kamus Hubungan Internasional. Bandung. 1999, hal. 11. [↑](#footnote-ref-23)
24. Joseph Frankel. Internasional Relations in Changing World. 1998, hal. 93. [↑](#footnote-ref-24)
25. Subandi, ‘Sistem Ekonomi Indonesia’, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-25)
26. Titik Pitaloka & Eva Yuliana Dewi K, ‘Pertumbuhan Ekonomi’, dalam <<http://www.academia.edu/5940372/Teori_Pertumbuhan_Ekonomi>>, diakses pada 19 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sukirno Sadono, 1995, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Edisi kedua, Jakarta : PT. Karya Grafindo Persada. hlm. 54. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sritomo Wignjosoebroto, 2003, Pengantar Teknik &Manajemen Industri Edisi Pertama, Jakarta : Penerbit Guna widya hlm. 19. [↑](#footnote-ref-28)
29. Sritomo Wigjosoebroto. Sutanta 2010, Klasifikasi jenis-jenis industri, dalam <<http://digilib.unila.ac.id/5372/15/BAB%20II.pdf> > diakses pada 4 April 2018. [↑](#footnote-ref-29)